

ANALISIS CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

¹Nurhayati Resky, ²Nilawati Uly, ³Ishaq Iskandar, ⁴Zamli

¹Universitas Mega Buana Palopo, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia, nurhayatireski26@gmail.com

²Universitas Mega Buana Palopo, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia, uly.nilawati79@gmail.com

³Universitas Mega Buana Palopo, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia, ishaqiskandar72@gmail.com

⁴Universitas Mega Buana Palopo, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia, zamlizam2019@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: Month, Date, Year

Revised: Month, Date, Year

Available online: Month, Date, Year

KEYWORDS

Jaminan Kesehatan, Kabupaten Tanah Toraja, Universal Health Coverage.

Health Insurance, Tanah Toraja Regency, Universal Health Coverage.

CORRESPONDENCE

Nurhayati Resky

Universitas Mega Buana Palopo
Indonesia

nurhayatireski26@gmail.com

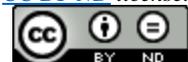
ABSTRACT

Universal Health Coverage (UHC) is a type of health insurance in Indonesia that is managed by an official institution receiving direct orders from the President, known as the Health Social Security Administration Agency. Tana Toraja Regency is one of the areas where this program is implemented, providing health coverage to those without insurance. The goal of the study is to analyze the UHC program's implementation by the Tana Toraja Regency Government. The study used qualitative research methods, collected data through interviews, and conducted the research within Tana Toraja Regency. According to the interviews, the bureaucratic structure of UHC services in Tana Toraja Regency is straightforward, making patients feel comfortable with the service procedures. While there are still some obstacles in its implementation, 84.71% of the people in Tana Toraja have been registered as participants in the UHC program. Overall, Tana Toraja Regency has successfully achieved its target of providing health insurance for almost all its residents, despite some who have not been registered. This success is attributed to the commitment and hard work of the Tana Toraja Regency Government.

ABSTRAK

Universal Health Coverage (UHC) merupakan bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan di Indonesia yang dikelola oleh lembaga resmi yang mendapatkan perintah langsung oleh Presiden yaitu BPJS Kesehatan. Salah satu daerah yang melaksanakan Program ini adalah Kabupaten Tana Toraja dengan memberikan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan program UHC oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Metode Penelitian kualitatif, pengambilan data melalui wawancara, lokasi penelitian di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil wawancara, struktur birokrasi dalam pelayanan UHC di Kabupaten Tana Toraja sederhana sehingga pasien merasa mudah dalam hal prosedur pelayanan. Dalam Pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi 84,71% masyarakat Tana Toraja telah terdaftar sebagai peserta program UHC. secara garis besar Kabupaten Tana Toraja telah berhasil mencapai target dan memberikan jaminan kesehatan bagi hampir seluruh penduduknya, walaupun masih ada penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

This is an open access article under the [CC BY-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah (Suprpto and Mulat, 2021; Saputro and Fathiyah, 2022) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan (Mannan, Ibad and Bari, 2022; Karwur, Lumunon and Tinangon, 2024).

Sistem kesehatan saat ini secara global diarahkan ke dalam program *Universal Health Coverage* (UHC) atau disebut Cakupan/ Jaminan Kesehatan Universal (Saputro and Fathiyah, 2022; Erinaputri *et al.*, 2023). Hal ini bertujuan agar terjadi penguatan sistem kesehatan secara komprehensif dan koheren dimana semua individu secara global dapat merasakan keadilan kesehatan tanpa takut keterbatasan finansial. Karena mencapai derajat sehat yang adil dan menyeluruh itu harus dilakukan dengan cara pembebasan finansial melalui akses yang mudah yaitu jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan (Ranabhat and Acharya, 2020; Ginting and Agustina, 2023).

Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan jaminan kesehatan merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kerena merupakan salah satu kesepakatan negara-negara anggota WHO termasuk Indonesia, pada tahun 2005 menyetujui sebuah resolusi, agar Negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan secara UHC yaitu kepesertaan dan akses mutu pelayanannya mencakup seluruh penduduk di Negara tersebut (Matheson, 2015; World Health Organization, 2019; Ranabhat and Acharya, 2020).

Program *Universal Health Coverage* adalah suatu program perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang belum memiliki jaminan Kesehatan (Nisoni, 2020; Putri

and Suryawati, 2022). Peserta *Universal Health Coverage* adalah penduduk Kabupaten Tana Toraja yang belum memiliki jaminan Kesehatan.

Di Kabupaten Tana Toraja, UHC mulai diterapkan sejak Januari 2022. Program ini diharapkan mampu memfasilitasi lapisan masyarakat menengah ke bawah atau peserta BPJS Kesehatan yang telah lama menunggak iuran. Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam bidang Kesehatan (Anggapurana Pidada, 2022).

Pada Mei 2024, masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 229.564 jiwa (84,71%) dari total penduduk 270.984 jiwa. Untuk peserta PBI APBD dan APBN berjumlah 172.120 jiwa (75%) dari total seluruh peserta program JKN yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Dengan begitu masih ada sekitar 15,29% penduduk di Kabupaten Tana Toraja yang belum menjadi peserta JKN.

Meskipun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih ada permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama terkait ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja tentang peserta UHC hanya sedikit yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta UHC dikarenakan minimnya sosialisasi tentang UHC kepada masyarakat.

Dengan adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait cakupan UHC di Kabupaten Tana Toraja khususnya terkait dengan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata atau kalimat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2024 di Kabupaten Tana Toraja.

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer menggunakan *instrument* metode wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian serta data sekunder terdiri dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian dan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan literature seperti buku, karya ilmiah dan laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang Mendukung Capaian UHC

Pengimplementasian program UHC di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan regulasi lain yang ada, juga ada aturan melalui MOU Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayahnya. UHC didefinisikan sebagai kondisi dimana semua orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang terjangkau, adil, dan non diskriminatif, kapan dan dimanapun mereka membutuhkannya, tanpa kesulitan finansial (Yandrizal, Rifa'i and Utami, 2017; Sobeang, 2022).

Beberapa jenis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung capaian UHC yaitu :

1. Melakukan perluasan kepesertaan dengan melakukan pendataan penduduk secara komprehensif dan sosialisasi tentang manfaat JKN-KIS kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin, pemerintah dalam hal ini kelurahan atau lembang mendata masyarakatnya yang kurang mampu, pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga mengarahkan agar setiap Puskesmas dan Rumah Sakit untuk mendaftarkan setiap masyarakat yang datang berobat apabila mereka belum memiliki jaminan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan seperti melengkapi sarana dan prasarana di Puskesmas dan Rumah Sakit, mencukupkan sumber daya manusia serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini, di Kabupaten Tana Toraja masih terdapat 2 Puskesmas yang belum memiliki dokter umum yaitu Puskesmas Kondoran dan Puskesmas Rantetayo, selanjutnya tenaga kesehatan lainnya telah tercukupi.
3. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program UHC, termasuk untuk iuran JKN-KIS PBI, pembangunan infrastruktur kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Penguatan regulasi dengan membuat regulasi yang mendukung program UHC seperti peraturan daerah tentang JKN-KIS dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, membentuk tim koordinasi UHC yang terdiri dari

berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program UHC serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program UHC secara berkala untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

b. **Komponen Aktor yang Mengembangkan dan Melaksanakan Program UHC di Kabupaten Tana Toraja**

1. **Pemerintah Daerah**

Dalam hal ini seperti Bupati yang berperan sebagai pemimpin daerah, bertanggungjawab untuk memimpin dan memastikan tercapainya program UHC di Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya terdapat tim percepatan UHC yang bertugas untuk menyusun strategi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program UHC yang terdiri dari berbagai OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan juga BPJS Kesehatan.

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat. Dinas Kesehatan bertugas untuk membangun dan memelihara fasilitas kesehatan daerah, mendistribusikan sumber daya manusia kesehatan secara merata, menyelenggarakan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta memantau dan mengevaluasi kualitas layanan kesehatan (Zulfikri and Putra Abza, 2020; Pratiwi, Madiarsa and Wati, 2022; Putra and Helmi, 2024).

Dinas sosial bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan masyarakat miskin dan tidak mampu ke dalam program JKN-KIS. Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bertugas untuk mengalokasikan

anggaran daerah untuk mendukung program UHC di Kabupaten Tana Toraja.

2. **BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Toraja bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan memverifikasi peserta JKN -KIS, memproses klaim pelayanan kesehatan dari peserta JKN-KIS serta melakukan edukasi dan sosialisasi program JKN-KIS kepada Masyarakat.

c. **Faktor Konteks yang Mempengaruhi Capaian UHC di Kabupaten Tana Toraja**

1. **Faktor Situasional**

a) **Faktor Demografi**

Populasi yang lebih tua umumnya memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi, yang dapat membebani sistem kesehatan. Selain itu daerah pedesaan dan terpencil di Tana Toraja mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke layanan kesehatan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang sadar akan pilihan kesehatan mereka dan kurang mampu mengakses layanan kesehatan.

b) **Faktor Politik dan Kebijakan**

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkomitmen untuk pelaksanaan program UHC di Kabupaten Tana Toraja dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mencapainya. Selanjutnya pemerintah berupaya agar jika terjadi ketidakstabilan politik diharapkan tidak mengganggu implementasi program UHC di Kabupaten Tana Toraja. Juga kerangka peraturan yang telah dibuat guna mendukung dan memastikan akses yang adil dan terjangkau ke layanan kesehatan.

c) **Faktor Ekonomi**

Di Kabupaten Tana Toraja, masih banyak masyarakat yang susah mencapai fasilitas

kesehatan karena biaya transportasi yang mahal, selain itu hilangnya pendapatan selama berobat menyebabkan mereka enggan untuk memeriksakan dirinya serta beban biaya hidup yang tinggi juga menyebabkan mereka untuk enggan ke fasilitas kesehatan pada waktu sakit.

2. Faktor Struktural

Kejelasan visi misi dan terukur akan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program UHC di Kabupaten Tana Toraja. Dengan adanya regulasi seperti peraturan daerah tentang UHC, standar pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi panduan pemerintah dalam melaksanakan program UHC.

Selain itu, koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Bapenda, serta penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Tana Toraja agar pelaksanaan program UHC berjalan lancar.

3. Faktor Budaya

Faktor lain yang mempengaruhi capaian program UHC di Kabupaten Tana Toraja yaitu adanya nilai-nilai budaya yang masih dianut oleh Masyarakat Toraja yang mempengaruhi cara pandang mereka tentang kesehatan seperti mencari layanan kesehatan ke dukun pada saat sakit, mengobati diri sendiri atau lebih percaya ke pengobatan tradisional dan mistik.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mengubah persepsi/ cara pandang beberapa Masyarakat tentang kesehatan.

d. Faktor Proses yang Mempengaruhi Capaian UHC di Kabupaten Tana Toraja

1. Faktor Pengembangan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun kebijakan UHC yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Kebijakan ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program UHC di Kabupaten Tana Toraja.

Kebijakan di susun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun rencana strategis dan anggaran untuk implementasi kebijakan UHC yang memuat rincian program, kegiatan dan target UHC yang ingin dicapai. Anggaran UHC dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

2. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi dalam penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan program UHC dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik ini diharapkan para komponen pelaksana dalam hal ini adalah aparat di harapkan dapat memahami akan isi dan kejelasan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara informan dapat diketahui bahwa, masyarakat belum sepenuhnya paham akan program UHC tersebut.

Pelaksana program sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tapi dalam hal konteks keberhasilan masih mengalami hambatan yang dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri dikarenakan kurang pemahannya masyarakat dengan program UHC tersebut untuk itu perlu adanya koordinasi dengan baik antara masyarakat dan tenaga kesehatan dan perlunya sosialisasi yang baik kepada masyarakat (Rifki Rismawan, 2018; Hazanul Zikra, 2022).

3. Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan program dan kegiatan UHC sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya implementasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Fasilitas Kesehatan.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berkunjung ke Puskesmas maupun Rumah Sakit bagi beberapa orang sudah baik namun masih ada pula yang beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal seperti lamanya waktu pendaftaran hingga masalah kurang ramahnya petugas pendaftaran.

4. Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan UHC secara berkala yaitu setiap tahun dengan melibatkan para pemangku kepentingan serta masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan UHC, selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan program UHC di Kabupaten Tana Toraja di masa mendatang.

Hasil evaluasi juga digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan UHC. Penyesuaian kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan UHC tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang mendukung capaian UHC yaitu melakukan perluasan kepesertaan JKN-KIS, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan SDM dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta meningkatkan sistem pendanaan kesehatan dan penguatan regulasi. Komponen aktor yang mengembangkan dan melaksanakan program

UHC yaitu Bupati, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, Bappeda dan BPJS Kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian UHC terdiri dari faktor situasional, faktor structural, faktor budaya serta faktor proses meliputi faktor pengembangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan

Diharapkan pemerintah Kabupaten Tana Toraja semakin meningkatkan perluasan kepesertaan JKN-KIS dan para pelaksana program semakin meningkatkan kualitas pelayanan, perlu adanya tambahan tenaga kerja/ pegawai di Puskesmas maupun Rumah Sakit agar pelayanan kepada peserta UHC lebih cepat dan berkualitas, serta diharapkan visi misi yang termuat dalam kebijakan program UHC tetap selaras dengan kebijakan nasional dan daerah serta dilaksanakan dan dimonitoring setiap tahun untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan UHC.

REFERENSI

- Anggapurana Pidada, I.B. (2022) 'Universal Health Coverage di Bali: Konsep, Implementasi, dan Tantangan', *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.14421/welfare.2022.111-01>.
- Erinaputri, N. *et al.* (2023) 'Peran Puskesmas Untuk Mencapai Universal Health Coverage di Indonesia: Literature Review', *Jurnal Medika Nusantara*, 1(2).
- Ginting, N.G.B. and Agustina, D. (2023) 'Implementasi Jaminan Kesehatan Daerah untuk Mencapai Universal Health Coverage (UHC) dalam Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Puskesmas Teladan Kota Medan', *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v2i2.366>.
- Hazanul Zikra (2022) 'Analisis Kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Kalimantan Tengah 2021 Menggunakan Regresi Logistik Biner', *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*,

- 6(2). Available at: <https://doi.org/10.21009/jsa.06206>.
- Karwur, C.E.T., Lumunon, T.H. and Tinangon, E.N. (2024) 'Pemenuhan Hak Mem peroleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum*, 13(02).
- Mannan, F., Ibad, S. and Bari, F. (2022) 'TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.153-164>.
- Matheson, D. (2015) 'Will universal health coverage (UHC) lead to the freedom to lead flourishing and healthy lives?: Comment on "inequities in the freedom to lead a flourishing and healthy life: Issues for healthy public policy"', *International Journal of Health Policy and Management*. Available at: <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2015.09>.
- Nisoni, D. (2020) 'Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang', *Journal of Politic and Government Studies*, 1(1).
- Pratiwi, K.I.H., Madiarsa, I.M. and Wati, N.P.S. (2022) 'MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG', *Widya Amerta*, 8(2). Available at: <https://doi.org/10.37637/wa.v8i2.906>.
- Putra, I.W. and Helmi, R.F. (2024) 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (1)(Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024).
- Putri, S.S. and Suryawati, C. (2022) 'Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Aspek Kepesertaan untuk Mencapai Universal Health Coverage', *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 21(2). Available at: <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.2.118-123>.
- Ranabhat, C.L. and Acharya, D. (2020) 'Methodological issues on "challenges and opportunities towards the road of universal health coverage (UHC) in Nepal: A systematic review"', *Archives of Public Health*, 78(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s13690-020-00418-x>.
- Rifki Rismawan, D.A.P.R.S.P. (2018) 'KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAHKOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL', *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI*, 07(4).
- Saputro, C.R.A. and Fathiyah, F. (2022) 'Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia', *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.53756/jjkn.v2i2.108>.
- Sobeang, D. (2022) 'PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI-INDONESIA DAN KUBA', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2). Available at: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52672>.
- Suprpto, S. and Mulat, T.C. (2021) 'Faktor Determinan Pengembangan Kapasitas Perawat dalam Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2). Available at: <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.628>.
- World Health Organization (2019) 'Universal health coverage (UHC) Key Facts', *World Health Organization* [Preprint], (January).
- Yandrizal, Y., Rifa'i, R. and Utami, S.P. (2017) 'ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR IURAN TERHADAP PENCAPAIAN UHC JKN DI KOTA BENGKULU', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1). Available at: <https://doi.org/10.24893/jkma.10.1.310.2015>.
- Zulfikri, Z. and Putra Abza, A.T. (2020) 'SISTEM MONITORING ODP DAN PDP COVID-19 DI GUGUS TUGAS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BERBASIS ANDROID', *Jurnal Teknologi Dan
Sistem Informasi Bisnis*, 2(2). Available at:
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v2i2.124>.